



*—Pencipta kurs bebas adalah penjahat terjenius  
dalam sejarah umat manusia di jagatraya—*

# **PROTOKOL KRISIS INDONESIA**

**M. Yudhie Haryono**





**Lembar Persembahan**  
**—Untuk semua kawan di Amphuni dan Saung Pancasila—**  
**Kuketik dengan sepenuh hati#**

**Judul:**  
PROTOKOL KRISIS INDONESIA

**Penulis:**  
M. Yudhie Haryono

**Editor:**  
Astika Wahyuaji

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
Penerbit *Kalam Nusantara*  
Jl. Pemuda Perum DLAP Blok F.7  
Depok 16431 Jawa Barat Indonesia  
Tel/Fax: +62-21-92677714/ +62-21-7773825  
Hotline: +62-21-85694382784. 08118207622  
Email: nusantaracom@yahoo.com  
<http://www.nusantaracentre.org>  
<http://www.int-journalnusantara.com>

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang  
All rights reserved, but:  
Diperbolehkan memperbanyak demi kemerdekaan mental.  
Diperbolehkan mengkopi demi kesejahteraan pengetahuan.

Ukuran Buku: 13X20cm  
Ketebalan: 24 hlm.  
ISBN: 978-60273808-----

Cetakan pertama: 2019  
Riset ini disponsori oleh PT. Nusantara Bakti Yuda



## *Daftar Isi—*

5—	Pengantar
8—	Krisis Mentalitas dan Moralitas
11—	Krisis Nalar Kewarasan
13—	Memahami Krisis Indonesia
15—	Wawasan Krisis
17—	Aksiologi Krisis
20—	Interupsi Krisis
23—	Krisis Negara Swasta
25—	Krisis Akal Alternatif
27—	Krisis Keadilan Sosial
30—	Krisis Pemerataan
33—	Krisis Uang dan Turunannya
36—	Penjajah Kertas: <i>Seigniorage</i>
41—	Beyond Krisis Ekonomi
44—	Penutup
48—	Tentang Penulis

## *Pengantar*

### MEMAHAMI KRISIS EKONOMI-POLITIK

Sudah lama. Ya. Sangat lama. Bahwa dalam berbangsa dan bernegara, kita mengalami perang kecerdasan-kejeniusan. Tentu juga perang ekonomi dan perang dagang. Tetapi tak banyak yang tahu. Sebab, yang banyak dari warganegara adalah sibuk mencari kebutuhan dasar yang tak mudah didapatkan. Tentu itu menjebak. Bahkan menjerumuskan. Tetapi, begitulah kenyataannya. Pasca proklamasi, kita disibukkan mencari sesuap nasi.

Dalam perang kecerdasan itu disebut bahwa mempertahankan kekayaan negeri penjajah adalah merubah model penjajahan. Salah satunya, para penjajah itu menciptakan krisis negara terjajah dengan berulang-ulang. Krisis berulang itulah alasanku menulis buku ini. Sebuah buku yang mencari tahu akar, sejarah dan solusi dari model penjajahan terbaru atas nasib bangsa-negara postkolonial.

Karena itu, tulisan yang menjadi buku kecil ini kuberi judul *protokol krisis* negara buat kita semua. Ini penting agar jika aku mati, tak menjadi arwah penasaran bin gentayangan. Sebab, sudah mewariskan pengetahuan terdalam guna mengatasi dan memenangkan pertempuran kecerdasan bin kejeniusan di masa kini dan selanjutnya.

Buku ini kuanggap penting karena makin ke sini, hidup makin tak pasti. Awalnya, stagnasi. Lalu, terjun pelan-pelan. Kadang menukik tajam. Tentu, fluktuasi, dirupsi dan turbulensi ini tantangan kecerdasan. Sedangkan krisis itu tantangan kejeniusan. Tantangan yang memerlukan mitigasi dari akal dan nalar. Tapi, itu tak cukup. Perlu keajaiban

semesta. Maka menang, utamanya memenangkan masa depan karena berhasil melewati dan menjinakkan krisis itu pilihan. Bukan sekedar takdir yang ditimpakan.

Tetapi, posisi itu tak begitu mudah ditangkap. Ya. Sebab masa depan tidak seperti rumah ibadah: yang sejuk dan menentramkan. Masa depan mirip lautan luas: penuh gelombang dan ketidak terjangkauan. Kalaulah bisa dimengerti, pasti itu penyederhanaan. Bukan sesuatu yang detil dan peta yang kongkrit.

Singkatnya, jika kondisi makin tak pasti, rasanya kita butuh pahlawan berkuasa yang berkata, “aku rela menjelma menjadi makanan bagi mereka yang kelaparan dan menjadi pekerjaan bagi mereka yang menganggur serta menjadi obat bagi mereka yang sakit.” Sebab, kelaparan, pengangguran dan kesakitan itu segitiga setan urban yang tak mudah ditundukkan (oleh siapa saja).

Karenanya, tugas terberat pahlawan berkuasa itu bukan hanya mengerjakan yang benar sesuai konstitusi dan kepentingan nasional, tetapi juga harus mengetahui apa yang benar menurut landasan negara dan filosofinya. Di sini, ia perlu kejeniusan yang meraksasa sebab di kursinya kendali perang modern dimenangkan atau kalah karena minus pengetahuan, defisit strategi dan alpa kendali mutu.

Dengan begitu, kita butuh para pahlawan-penguasa negeri dengan P besar agar berpikir dan bertindak besar. Jika kita punya pahlawan-penguasa dengan P kecil maka yang terjadi adalah negara ini merasa seolah-olah merdeka. Tetapi, merdekanya seolah-olah. Dalam negara seolah-olah, kesuksesan sekolah kita adalah panen ternak begundal kolonial bermental kolonial yang membela pembayar dan sekutu penjarah.

Sekolah kita kiranya punya kualitas lucu dan purba karena berkurikulum “surplus memori tetapi minus

intelengensi.” Banyak menghapal dan menghitung, tak banyak menganalisa, bertanya dan inovasi. Akhirnya, kita surplus sarjana dan akademisi, tetapi minus nurani. Itulah mengapa banyak akademisi kita korupsi. Menjadi santri KPK bersama penjahat negara lainnya.

Dalam sekolah ber kurikulum seperti itu, akhlak terbaik dari agensinya adalah sikap *ngadalin bin ngibulin*. Ia represif dan menang sendiri. Ia pribumi berwatak kompeni. Ia mengkarbon-kopi cara jahat para penjajah dan rezim otoritarian. Ia bahagia di tengah paria warganya.

Bagi agensi seperti ini, hipotesa besar soal mengerjakan tugas kenegaraan pasti absen. Padahal, hipotesanya sangat sederhana: 1)Makin konstitutif ekonomi-politik sebuah negara maka makin adil-makmur warganya; sebaliknya, 2)Makin menjauhi konstitusi, ekonomi-politik sebuah negara maka makin senjang kekayaan warganya.

Pahlawan-penguasa dengan P besar menyadari kita hidup di samudra maha luas. Dus, kejeniusannya mampu mencipta keluasan. Proyeksinya mencipta pelangi dan kebhinekaan yang tunggal ika dalam persatuan. Kesendiriannya mencipta metoda-metoda perealisasi konstitusi. Di dalam mental pahlawan-penguasa dengan P besar, kehilangan masa lalu harus menciptakan sejarah perlawanan pada penjajah baru di masa kini dan datang. Perjalanan ke depan mencipta roman *legacy* yang dikenang semilyar tahun oleh anak cucu. Dus, dalam hatinya, ia selalu bertanya, “apa warisanku untuk negeri ini?” Tentu bukan pertanyaan, “berapa yang sudah kurampok dari bangsaku ini.”

Pahlawan-penguasa dengan P besar akan mengerti yang paling berharga dan tak bisa dimiliki sendirian. Yaitu kemartabatan, kedaulatan, keadilan dan kemakmuran bagi seluruh warga negaranya, serta harga diri bangsanya di mata dunia.

Ia menjadi jalan sekaligus solusi dari krisis dan turbulensi negeri. Ia yang menjadi sosok pahlawan, bukan sekedar presiden dan para menteri. Ia yang kuat mental dan dahsyat moral.

### *Pertama*

## KRISIS MENTALITAS DAN MORALITAS

Sayangnya, yang terjadi sebaliknya. Kita surplus agensi yang dementalisasi dan demoralisasi. Padahal, pada mulanya adalah kehancuran mental dan moral. Dus, krisis besar bangsa ini berasal dari krisis mental dan moral. Padahal, mental dan moral adalah modal. Keduanya merupakan prasyarat bagi operasi mendasar guna melahirkan budaya kebangkitan (Yudi Latif, 2009:48).

Mental dan moral adalah ontologi sekaligus pondasi. Jika mental-moral bernegaranya kuat, pasti kuatlah bangsa ini. Karenanya, mental dan moral bagaikan koin yang menyatukan dua wajahnya. Keduanya membentuk aturan atau tata cara hidup yang bersifat normatif (mengatur/mengikat) yang sudah ikut serta bersama kita seiring dengan umur dan peradaban manusia.

Titik tekan “mental-moral” adalah aturan-aturan normatif yang perlu ditanamkan dan dilestarikan secara sengaja, baik oleh keluarga, lembaga pendidikan, lembaga pengajian, atau komunitas-komunitas lainnya yang bersinggungan dengan masyarakat. Keduanya menjadi navigasi di mana kita dan ke mana kita akan menuju (Elwin Tobing, 2018:xvii).

Secara umum, moral diartikan sebagai batasan pikiran, prinsip, perasaan, ucapan, dan perilaku manusia tentang nilai-nilai baik dan buruk atau benar dan salah. Moral merupakan suatu tata nilai yang mengajak manusia untuk berperilaku positif dan tidak merugikan orang lain.



Dus, seseorang dikatakan telah bermoral jika ucapan, prinsip, dan perilaku dirinya dinilai baik dan benar oleh standar-standar nilai yang berlaku di lingkungannya. Sedang moralitas adalah kualitas dari perbuatan manusia yang menunjukkan bahwa perbuatan itu benar atau salah, baik atau buruk. Singkatnya, moralitas mencakup tentang baik-buruknya perbuatan manusia. Contoh terbaik dari moralitas adalah kesetiaan, keadaban, keselarasan dan konsensus.

Jika makna moral diacu ke wilayah publik maka kini tak ada lagi daulat moral. Kini tak ada lagi moralitas. Apalagi moralitas kepahlawanan. Sebaliknya, agama berganti ziarah. Ideologi bermetamorfosis menjadi lendir. Moral, agama, ideologi dan kedaulatan negara sudah jadi mitos purba, ditelan oleh kuatnya modal sebagai pilihan keserakahan dunia.

Dalam daulat modal, semua warganegara bertanya, “berapa hargamu?” lalu “dibayar berapa?” dan “siapa yang menang?” lalu “untung berapa?” Semua berasal dari pikiran uang dan berakhir dengan uang. Padamu uang dan bagimu uang. Hulu dan hilirmu adalah uang.

Publik dan respublica habis. Nalar umum dan kebijakan maslahat hancur. Tirani modal melahirkan monoterisasi (uang adalah segalanya). Ada uang, ada semuanya. Dengan uang, seseorang dapat mengatur prihatin, publik, budaya, agama plus negara.

Saat modal mengkonsolidasi via agensi hitam dengan eksploitasi-ekspansi-akumulasi maka negara persis di bawah ketiaknya. Dus, kemerdekaan, kemodernan, kemandirian, kemartabatifan dan batas wilayah yang penting bagi negara akan menjadi belenggu bagi meluasnya gerak modal dengan kepentingan akumulasi.

Pada konteks ini, saat dua kekuatan (idealisme versus oportunis) berhadapan-hadapan maka hukum besi persaingan bebas akan bekerja, “siapa yang lemah bakal menjadi pihak

yang kalah.” Yang kalah akan hilang. Yang menang akan dominan.

Dus, bagi negara-bangsa yang dipimpin para pecundang dan culun sehingga memiliki ketergantungan besar akan mengalami kekalahan bahkan kehancuran. Ini merupakan nasib dari keberadaan suatu negara-bangsa yang merelakan daulat modal sebagai nilai dan imaji barunya.

Kini, semua warganegara sudah berada pada titik di mana daulat modal menisbikan segalanya. Padahal, modal dan kemerdekaan sesungguhnya berangkat dari titik yang sama yaitu hak dan tujuan warga manusia. Bedanya, kemerdekaan menciptakan batas, sementara modal menghancurkannya.

Kini, gerak daulat modal tidak dapat dibatasi. Daulat modal hadir di mana saja dan kapan saja. Semua demi menciptakan proses akumulasi tak terbatas. Saat daulat modal dijadikan pintu masuk para kriminal-begundal-kolonial, kita yang waras kemudian terjebak isu-isu pinggiran: presiden tidak tahu dirinya, kabinetnya gokil, dewannya ngutil, militernya jualan narkoba, yudikatifnya jadi makelar dll.

Akhirnya, praktik ekonomi-politik ilegal yang massif, strukturif, destruktif dan terorganisi berbasis uang kini jadi keseharian. Moral membusuk. Konstitusi hilang. Sejarah terhapuskan. Ide dan gagasan ditongsampahkan. Itukah negara kita kini? Atau bagaimana menurut kalian? Kok rasa-rasanya kita tak menemukan setitik sinar mentari di masa kini, sehingga makin temaram dan gelap di masa depan.

Padahal, krisis mental-moral ini hanya hulu. Hilir dan peta akhirnya masih tidak tak terbayangkan. Tetapi, jika hilirnya saja sudah sedemikian rusak dan cemar, akankah kalian diam? Sebagai warga pancasila, kita sebenarnya ditantang terus menerus mencari antitesanya.

## *Kedua*

### KRISIS NALAR KEWARASAN

Dari mental dan moral yang krisis, lahirlah krisis ilmu pengetahuan. Ini badannya sebelum hilirnya. Dus, ilmu keindonesiaan, praktik revolusi, pengetahuan postkolonial dan ilmu kedokteran tak berkembang lagi pasca kemerdekaan (Hans Pols, 2019:25). Semua stagnan. Jebakan finansial menjadi lebih utama daripada idealisme yang pernah terjadi pada masa pra kemerdekaan. Kini, elite Indonesia merubah frasa dari “menjadi Indonesia yang progresif” lalu frasanya “menjadi pencari kapital yang oportunistis.”

Padahal, Indonesia adalah negara yang sangat besar, baik ukurannya maupun potensinya. Kini berpenduduk lebih dari 240 juta. Tetapi, masalahnya begitu melimpah. So, harus lahir dan hadir pemimpin besar dengan kualitas terbaik dan “menyempal” untuk memimpin negara ini demi kebaikan, kesejahteraan, keadilan dan keadaban bersama.

Menyempal itu *crank*. Cirinya ada tiga: 1)Anti libidinal atau tak menyembah lawan jenis; 2)Anti kapital atau tak menyembah duit/harta; 3)Anti status quo atau tak menyembah kemapanan dan masa lalu. Dus, pribadi *crank* itu sangat keren: ia enigma yang diburu; ilusi yang dimengerti dan jiwa yang dipelajari serta gagasan yang dipenjara tetapi memberontak melewati batas-batas kuburan sekalipun.

Ia jenius, progresif, solutif plus revolusioner. Karenanya, ia memisahkan secara tegas masa lalu dan masa depan. Ia membebaskan pikiran kita dari penjajahan dalam arsitektur yang paling canggih sekalipun.

Maka, kita mestinya bertengger di atas mental mereka yang punya perlawanan. Di tindakan mereka yang *crank*, kita akan berhenti. Ya berhenti membuang dan melepas akal kolonial. Akal yang dimiliki dari warisan kolonial. Lalu, kita

membebaskan jiwa. Berjuang dan revolusi atas cinta negeri dan sisa umur.

Inilah waktunya. Jika telat, zaman edan makin cepat meluas. Zaman ini lahir dari medsos: tanpa kepastian masa lalu, tanpa keyakinan hari ini dan tanpa kejelasan masa depan. Zaman ini membuat orang Indonesia menjual semuanya, bahkan dirinya sendiri. Mereka tak akan menabung, mereka tak mau untung.

Zaman ini kita surplus pemimpin bertampang pribumi bermental dan berperilaku kompeni. Sadis dan jahat. Kerjanya memalak teman sendiri. Bahagia menjalankan agenda anti Pancasila. Pemimpin seperti ini membuat negara absen di mana saja dan kapan saja. Padahal, saat negara alpa, warganya berlari ke *tribus* dan berlindung ke doa serta bermimpi kedatangan ratu adil yang ilusif.

Dengan pemimpin dan zaman edan seperti ini membuat kita kehilangan jiwa kesetiakawanan sosial; defisit gotong-royong; minus kemanusiaan semesta. Sebab, tak ada lagi yang bisa disumbangkan, kecuali doa. Tak ada sisa bahagia kecuali duka.

Karena itu, zaman edan ini harus dihentikan. Dan, cara penghentiannya tak perlu kerumunan besar. Kita tak harus pusing tujuh keliling untuk meluruskan kiblat bangsa yang sudah melenceng jauh ini. Tak perlu gerombolan canggih untuk memastikan kesejahteraan bersama suatu negara. Tak perlu parpol besar untuk menegakkan moral pejabat pemerintah yang sudah bejat.

Cukup pasukan kecil yang bergerak rapi dan memiliki ide-ide jenius dalam *tagline*: “pamit pejah.” Yaitu kehidupan yang diringkas menjadi lahir, jihad, zuhud, syahid. Jika itu kita punya, kita pastikan keadilan dan kesejahteraan serta martabat seluruh penghuni peradaban Indonesia akan tertradisikan.

Aku siap makmum. Loyal. Sudah kuwakafkan jiwa ragaku untuk republik tercinta. Kawan, pimpin pasukan ini. Kita akan pastikan peradaban baru: Kerja keras, kerja cerdas, kerja trengginas, kerja tuntas!

### *Ketiga*

## MEMAHAMI KRISIS INDONESIA

Tanpa mental dan moral yang dahsyat serta tanpa ilmu keindonesiaan yang tangguh, krisis ini berlanjut ke seluruh sektor kehidupan. Tak percaya? Mari kita mulai bertanya. Di manakah jutaan buruh saat 1 persen elit bisa menguasai 53 persen kekayaan kita? Di manakah rakyat miskin saat 15 perusahaan asing menguasai 7500 Triliun tabungan rakyat di bank-bank?

Dan, di manakah kaum idealis saat begundal 20 konglomerat menguasai 55 persen tanah-tanah rakyat? Di manakah mereka saat banjir buruh asing? Di mana mereka saat krisis ekonomi berulang terjadi?

Inilah kondisi arsitektur ekonomi kita mutakhir. Lewat sogok, paksa, bedil, kertas (UU) dan jebakan hutang, para konglomerasi asing makin gigantik. Tentu setelah mereka orgasme pasca menyetubuhi para penguasa. Lahirlah aliansi penguasa-pengusaha (peng-peng). Mereka berdua kemudian memonopoli perdagangan (Onghokham, 2018:181). Berkembanglah praktik kartel, agensi oligark dan agama klepto plus tradisi predatorik.

Pesta, golf dan perzinahan adalah aksioma konglomerasi dengan penguasa kita dari dahulu kala yang tak dihentikan praktiknya. Maka selingkuh, narkoba, lendir, judi dan korupsi menjadi menu empat sehat lima paripurnanya.

Kini kartelis, oligarkis, kleptokratis dan predatoris makin jadi aksiologi ekonomi kita. Kini apa yang haram sudah jadi

halal. Apa yang tabu sudah jadi niscaya. Apa yang menjijikan sudah mempesona.

Tak percaya? Lihat penguasaan sektor Kebun Sawit saja. Konglo Salim Grup kuasai 500.000 hektar, Sinar Mas 650.000 hektar, Astra 600.000 hektar. Total konglo ini kuasai lebih 2 juta hektar kebun di mana hasil penjualannya selama 25-30 tahun disimpan di luar negeri.

Lalu, kini mereka melakukan *transfer pricing-transit export-affiliated company*. Aksinya, pabrik pengolahan produk turunan hasil kebun tidak dibangun di Indonesia sehingga harga produk kebun ditentukan sendiri.

Setelah menumpuk kartel dan klepto uang hasil kebun, mereka tarik kembali untuk *take-over* lahan PTPN. 1-5 tahun ke depan sekitar 2.5 juta hektar lahan milik PTPN harus direplanting. PTPN tak punya uang, lalu mereka masuk. Lalu, kuasai tanah sebagai harta paling berharga sekaligus jadi kartel sawit nomor 1 di dunia sambil mengatur harga di pasar CPO dan turunannya yang luar biasa besar uangnya.

Buruh sawitnya gigit jari: tetap miskin. Indonesia tidak banjir uang: sebaliknya tetap cari utangan ke mana-mana. APBN kini makin kosong, defisit!

Ini semua karena sesat pikir dan kalah berpikir. Sebab, dalam logika neoliberal, buruh adalah deret ukur, bukan asset. Dalam rezim finansial, buruh adalah alat produksi, bukan manusia. Derajat mereka lebih rendah dari uang dan angka-angka inflasi.

Sesungguhnya, dalam negara merdeka mereka subjek. Mereka penentu. Mereka produsen. Mereka manusia. Jika kini mereka paria karena jadi deret ukur, alat produksi dan objek maka sesungguhnya “negara ini belum merdeka.” Mereka dijajah oleh teman sendiri yang sedang berkuasa. Satu kuasa kapital serakah berwajah pasar. Padahal, tak ada demokrasi dalam demokrasi pasar. Yang ada hanya mobokrasi. Tak ada

ekonomi dalam ekonomi pasar. Yang ada hanya ekonometrika.

Dalam mobokrasi dan ekonometrika, buruh hanya ada jika mampu bayar. *They pay, they there*. Tapi bagaimana mau bayar jika harga sembako lebih cepat larinya dari UMR? Kini, tak ada jalan lain bagi para buruh kecuali mati syahid atau rebut kuasa negara. Terlalu bodoh jika cita-cita kemerdekaan ditunggu. Apalagi diserahkan perebutannya ke orang dan organ lain. Tidak ada sejarahnya kemerdekaan direbut oleh parpol dan agensi asing.

So, konsolidasikan terus. Bekali pikiran cerdas. Pupuk keberanian. Ambil kuasa negara. Jadilah subjek. Sebab antara kalian dan penjajah sama-sama manusia. Yang membedakan adalah kalian punya hati dan konstitusi. Sementara penjajah hanya punya keserakahan dan jiwa kegelapan.

Ingat, jika sakit jantung, bukan minyak kayu putih obatnya. Jika negara sakit, bukan parpol obatnya. Yang tepat, diagnosa dan tindakan medisnya adalah operasi negara di jantungnya.

Jadilah kalian buruh-buruh itu: “dokter bangsa.” Dokter yang mengobati sakit mental, sakit nalar, sakit agama dan sakit tindakan seluruh elite negara kini. Kalau bukan kalian, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, lalu kapan? Pimpinlah revolusi ini. Revolusi moral, revolusi pengetahuan dan revolusi kepemilikan. Inilah cikal bakal pemahaman krisis di Indonesia. Inilah jalan kita mengendalikan krisis jika terjadi di depan mata: revolusi kepemilikan (saham).

### ***Keempat***

## **WAWASAN KRISIS**

Tanpa revolusi kepemilikan, kemerdekaan menjadi muspro bin mubazir. Lebih jauh, negara berubah menjadi

centeng (I. Wibowo, 2010:35). Dan, apa buah dari pilihan negara postkolonial yang melupakan revolusi kepemilikan sambil menyetubuhi demokrasi liberal? Hanya ada dua anak biologisnya: krisis dan ketimpangan (*crisis and social discrepancy*).

Padahal, krisis adalah metoda kapitalis mengakumulasi kapitalnya. Sedangkan ketimpangan adalah cara kapitalis mempertahankan dan melipatgandakan kapitalnya. Beberapa riset menunjukkan bahwa 9 dari 10 negara postkolonial yang mengimani demokrasi liberal, kolap ekonominya karena krisis tak berkesudahan. 8 dari 10 negara postkolonial yang menyetubuhi demokrasi liberal, banjir kaum miskin tak berpreseden dan tumbuh langka konglomerat.

Dari altar demokrasi liberal, nalar publik, mati. Kewenangan negara, defisit. Kewarasan pejabat, punah. Kemerdekaan bangsa, pupus.

Yang terjadi kemudian adalah banjir koruptor, gemuruh asap, telenovela MKD, drama papah minta jatah dll. Ini bukti yang telanjang dan jelas menunjukkan bahwa pemerintah (presiden) tidak lagi memiliki kewenangan yang kuat untuk mengeksekusi setiap kebijakan publik yang bersendi kewarasan publik.

Kewenangan eksekusi ini sudah ditentukan oleh kekuatan korporasi yang membiayai presiden sebelum dan sesudah berkuasa via pemilu.

Intervensi korporasi dalam kebijakan publik dengan pasti telah menempatkan posisi presiden (sebagai kepala negara) pada keadaan lunglai, loyo dan impoten. Kuasa korporasi dalam menjajah-menjarah kewenangan negara telah jauh mengantarkan kehidupan warganegara limbo dan hanya bisa menonton, konsumsi atau paling banter memaki.



Tentu saja, perilaku ini sengaja diciptakan untuk mempertahankan hegemoni dan dominasi korporasi agar tetap berdiri dengan gagah dalam penguasaan SDA dan SDM.

Bahkan untuk menghapus perdebatan-perdebatan substansi kewarasan warganegara menuntut haknya, kuasa korporat hanya taburkan 0.5% buat media agar beritakan lendir 24 jam non stop. Nalar publik akhirnya mati berkali-kali. Kematian itu menyebabkan kelumpuhan demokrasi. Dalam demokrasi yang lumpuh, cinta (suci) tak lagi tumbuh penuh seluruh. Negara jadi musuh kewarasan dan bangsa jadi mesin pembunuh kecerdasan. Cinta, negara dan bangsa makin teralienasi karena menjadi budaknya para budak kuasa kapital semata.

Apa harapan kalian kini? Diam dan berdoa atau ziarahkah? Aku mengajak kalian berontak. Merebut daulat pikir, kemandirian hati, kemodernan lisan dan kemerdekaan aksi. Mari perluas wawasan, pertajam pengetahuan. Bekali dengan kerakusan ilmu dan keidealismean. Kini atau tidak sama sekali. Bersama atau mati.

## ***Kelima***

### **AKSIOLOGI KRISIS**

Jika wawasan sudah menggeliat, tugas berat berikutnya adalah mencandra aksi-krisis. Caranya, mari kita mulai dengan pertanyaan, “mengapa kita sering panen krisis (ekopol)?” Dengan mengkompilasi data, kita bisa menjawabnya dengan tesis: krisis merupakan anak tangga dari konflik. Dan, konflik merupakan hulu dari kemenangan ideologi neoliberal. Karena itu, hilirnya adalah *profit taking and accumulate capital*.

Dalam bahasa Herry-Priyono (2008:1), “ini semua karena kegiatan ekonomi kita tercerabut dari *oikonomia*

(kebutuhan dasar manusia) yang bergeser menjadi *chrematistic* (perdagangan uang).”

Singkatnya, krisis adalah metoda, cara dan siasat perampokan semata dari oligark kepada kaum paria. Tidak lebih dan tidak kurang. Sebab itu kehadirannya didukung oleh sistem, tekhnik, perangkat, watak, doktrin dan agensi. Terutama agensi yang punya mental hewan (*animal spirit*) yang brutal, serakah dan irasional. Merekalah subjek-subjek utamanya.

Sejak kapan sejarah penjarahan ini bermula? Tentu saja sejak bermetamorfosenya wajah “*old colonialism*” berwatak teritorial ke wajah “*new colonialism*” berwatak kurs dan utang-piutang (*bonds*).

Kita tahu, surat utang merupakan piranti fiskal (depkeu) sedang percetakan uang merupakan piranti adrenalin (bank sentral). Karena kini keduanya diisi oleh agensi neoliberal maka gejolak dan krisis selalu dimulai dari dua institusi tersebut dengan instrumen utang dan jebakan kurs. Tepatnya kurs bebas. Tentu saja ada penguatnya. Yaitu rapuhnya struktur ekonomi kita karena mengalami denasionalisasi dan deindustrialisasi. Dengan krisis itu, praktis kini kita hanya punya ekonomi distribusi dan konsumsi.

Pada negara yang tak kuat industri dan produksinya maka warganegaranya hanya jadi budak. Mental budak yang kini menjadi elite negara mengakibatkan nonproduktif dan tidak mampu merancang industri sendiri sesuai kondisi dan kebutuhannya.

Akhirnya kita menjadi tanah jajahan bagi pemodal asing/aseng yang menentukan industrinya sesuai selera global. Tepatnya sesuai kebutuhan perut mereka saja.

Ingat, pada negara merdeka, konflik dan krisis sebisa mungkin dihindari. Pada negara modern, konflik dan krisis dicari solusinya. Sedangkan pada negara predatoris, konflik

dan krisis diciptakan. Itu artinya, jika Anda berkuasa dan memilih, pilihlah model negara merdeka sesuai konstitusi. Jika tidak, negara Anda dalam kuasa modal yang dikrisiskan terus-menerus.

Dus, agar negara merdeka dan terhindar dari konflik plus krisis ekonomi maka perkuat nasionalisasi dan industrialisasi sebagai roadmapnya.

Lalu, apa itu nasionalisme ekonomi? Dawam Rahardjo (2001:89) menjawab dengan menulis, “ini adalah idealisme yang berorientasi kepada tindakan pengelolaan ekonomi yang lebih mengutamakan proses pelipatgandaan nilai tambah sumber daya ekonomi nasional yang memberikan nilai guna bagi sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran seluruh warganegara: dari, oleh dan untuk semua warganegara.”

Landasannya yaitu setiap kehidupan berekonomi memiliki ciri/identitas, cita-cita/idealisme yang berbeda-beda. Identitas tersebut harus dipertahankan karena merupakan properti dan prasyarat kedaulatan.

Logika ini memberikan satu isyarat bahwa sistem ekonomi dan pengelolaannya tidak bisa diseragamkan dan tidak bisa didekte agar mengikuti doktrin sistem ekonomi dari negara dan bangsa lain.

So, tugas nasionalisme ekonomi kita juga jelas dan berbeda dengan bangsa lain: 1)Membunuh kemiskinan, kebodohan, kepengangguran, kesakitan, ketimpangan, konflik, krisis, ketergantungan dan keterjajahan; 2)Menumbuhkan jiwa dan mental merdeka, mandiri, modern dan martabatif kapanpun dan di manapun plus oleh siapapun; 3)Memastikan posisi Indonesia sebagai pusat peradaban mulia.

Inilah aksiologi krisis dan cara perlawanannya. Fokus. Cermat. Rasional dan progresif. Kalian di mana? Kami menunggu dengan setia.

## *Keenam*

### INTERUPSI KRISIS

Tanpa pengetahuan dari aksiologi krisis, kita akan terus terjajah kembali walaupun ada kebebasan individu. Tahukah kalian bahwa janji demokrasi liberal adalah menjamin kebebasan individu? Juga, menjamin siapa saja boleh kaya-raya. Janji yang juga membolehkan penjual apa saja (agama, BUMN, kayu dan negara sekalipun) bisa menjadi presiden.

Selebihnya, janji itu dilengkapi dengan tugas suci demokrasi liberal untuk mengakumulasi kekayaan konglomerat dan menggerogoti kekayaan kaum miskin. Membagi tanah buat si kaya dan menyuruh si miskin bayar air yang keluar dari tanahnya.

Sedangkan praktek demokrasi liberal adalah memastikan kesenjangan dan ketergantungan; membuat kota-kota baru yang kumuh dan macet; mentradisikan hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas; mencipta turbulensi ekonomi tanpa solusi; dan menghadirkan krisis berulang-ulang.

Dalam sejarahnya, ciri-ciri demokrasi liberal adalah:

- 1) Negara yang lemah pada kontrol alokasi SDA dan SDM;
- 2) Kekuasaan eksekutif dibatasi oleh pasar dan kekuatan kapital;
- 3) Kekuasaan yudikatif dibatasi oleh oligarki dan kleptokrasi yang bersifat predatorik;
- 4) Kekuasaan legislatif bersekutu dengan kartel merampok SDA dan SDM;
- 5) Kelompok minoritas (agama, etnis dan ras) boleh berjuang untuk memperjuangkan dirinya tapi negara tidak menjamin apa-apa.

Selebihnya, negara dan aparatusnya dibebaskan dari tanggungjawab sosialnya secara signifikan, konstitusi hanya dipajang, moral hanya diperbincangkan, hukum hanya jadi guyon belaka.

Karena alasan-alasan di atas, sebagian pendiri republik menolak berlakunya demokrasi liberal. Sebagai antitesanya, dibuatlah demokrasi terpimpin. Ini konsep jenius saat kita memilih kemerdekaan. Sebab revolusi adalah perjuangan yang terpimpin. Tanpa kepemimpinan, revolusi hanya kerumunan. Kalah, ditindas, dijajah dan bendera tak akan berkibar.

Dalam demokrasi terpimpin tidak semua orang bisa dan boleh memimpin. Hanya yang punya ide, gagasan, moralis dan dahsyat yang diperbolehkan. Sebab itu, kepemimpinan adalah soal imaji dan kemahacerdasan, bukan hanya soal takdir dan pencitraan.

Dari demokrasi terpimpin lahirlah ekonomi terpimpin. Inilah sistem ekonomi di mana perilaku ekonomi ditentukan oleh pemimpin yang benar yang mengambil keputusan atas sebagian besar masalah ekonomi tentang apa yang harus diproduksi, bagaimana memproduksinya, dan siapa yang mengkonsumsinya.

Sistem perekonomian terpimpin ditunjukkan dengan kecerdasan sentral pengambilan keputusan. Para pemimpin pemerintahan selaku pengambil keputusan, tersentralisasi dalam menetapkan rencana yang rinci dan kompleks sehingga memberikan komando ekonomi kepada segenap bawahan dan rakyat.

Oleh karena itu, sistem perekonomiannya disebut juga sistem ekonomi terencana secara sentral. Dengan demikian, dalam sistem perekonomian terpimpin, negara hampir memiliki dan menguasai semua sarana produksi (tanah atau modal). Ia menjadi negara kaya karena memiliki.

Di samping itu, negara mengatur secara langsung operasi semua perusahaan di berbagai sektor industri. Jadi, negara via BUMN merupakan pemilik dan regulator bagi semua

angkatan kerja dan menentukan bagaimana mereka harus melaksanakan pekerjaannya.

Negara menentukan juga komposisi barang yang harus diproduksi dan pendistribusiannya kepada semua warganegara. Dengan demikian, dalam perekonomian terpimpin, pemerintah merupakan pemegang pengambilan keputusan secara sentral yang menjawab masalah-masalah ekonomi utama melalui kepemilikan dan penguasaan atas sumber daya ekonomi melalui kekuasaan untuk mengambil dan memaksakan keputusan kepada warganegaranya.

Dengan demikian, ciri-ciri dari sistem ekonomi terpimpin adalah: 1) Semua alat dan sumber-sumber daya dikuasai negara; 2) Hak milik perorangan diakui sepanjang halal dan sah; 3) Seluruh kebebasan ekopol dalam kegiatan perekonomian diperuntukkan demi pemerataan ekonomi, kesejahteraan dan keadilan; 4) Kebijakan perekonomian diatur sepenuhnya oleh, dari dan untuk wakil warganegara yang ada di MPR dan dikerjakan oleh eksekutif; 5) Semua kegiatan ekopol digerakan demi tegak dan bermartabatnya seluruh warganegara dan seluruh tumpah tanah-udara-air secara mondial dan berkelanjutan.

Dengan ciri itu maka kelebihan sistem ekonomi terpimpin adalah: 1) Negara bertugas lebih jelas dalam pembelaan dan kehadirannya; 2) Negara lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran, kebodohan, ketimpangan dan kemiskinan; 3) Pasar barang dalam negeri berjalan lancar; 4) Negara dapat turut campur dalam hal pembentukan harga, produksi dan industri; 5) Negara relatif mudah melakukan distribusi pendapatan sehingga jarang terjadi krisis ekonomi yang akut.

Yang jadi pertanyaan adalah, kemarin dan kini, kenapa elite kita memilih demokrasi liberal? Jelas karena mereka tak

punya ide dan gagasan. Akhirnya mereka jadi budak dan koloni dari negara lain yang lebih cerdas dan buas.

Ke depan, aku mengajak kalian mencipta sejarah. Anti penjajah, anti perbudakan, anti kebuasan dan anti keserakahan. Kita pimpin dan wakafkan harta dan nyawa demi mercusuar dunia.

## ***Ketujuh***

### **KRISIS NEGARA SWASTA**

Tanpa solusi yang cerdas, berani dan kuat, krisis akan menjelmakan cucunya ke dunia. Ia bernama negara swasta. Ya, negara swasta adalah cucu haram krisis yang berkepanjangan. Dus, pelan dan pasti kini yang terjadi adalah “negara swasta.” Dan, itulah arsitektur terbaru hasil persetujuan akut dari tiga serangkai: fundamentalisme pasar (*neoliberalis*), terorisme agama (*neofundamentalis*) dan fasisme ekonometrika (*neotribalis*).

Soal segitiga tiga serangkai ini sebenarnya sudah lama diprediksi oleh Bung Karno. Kini hanya kulminasinya saat kita tak mengerti operasi dari tiga agensi tersebut.

Apa itu swastanisasi negara? Mari kupas pelan-pelan. Swastanisasi negara adalah pengalihan dan pengendalian pemerintahan yang sebelumnya dikuasai dan dikendalikan oleh semua warganegara menjadi dikuasai dan dimiliki oleh segelintir warga (asing, aseng dan asong).

Bagaimana itu terjadi? Melalui ternak kapitalisme lanjut (kleptokrasi, oligarki, predatorik dan kartelik). Apa operasinya? Dengan membuat manusia tidak menyadari kemanusiaannya. Manusia yang tunduk pada simbol, angka dan kontestasi.

Singkatnya warganegara yang mengabsenkan konstitusi, merabuni diri dari sejarah kejuangan sambil menternak *road map* impor yang tak peduli problem dasar kewargaan. Dus, adalah kapitalisme lanjut yang membuat manusia harus bekerja lebih dari yang diperlukan. Kapitalisme lanjut ketakutan akan kesadaran manusia yang dieksploitasinya. Dan, cara terbaik membuai manusia agar tak sadar adalah meninabobokan mereka di negara swasta.

Di negara swasta, ada beberapa ciri yang terus terjadi. *Pertama*, pemerintah mencitrakan kerakyatan, tetapi menihilkan dentuman. *Kedua*, pemerintah gagal menemukan solusi, tetapi berhasil menguasai kursi.

*Ketiga*, pemerintah berhasil menumpuk hutang, tetapi gagal meredam berang. *Keempat*, pemerintah surplus cacian, tetapi minus gagasan. *Kelima*, terjadi sedikit industrialisasi, tetapi minus lapangan pekerjaan. *Keenam*, kebijakan fiskal luas, tetapi defisit stimulus. *Ketujuh*, ada interkoneksi perbankan, tetapi alpa kemudahan. *Kedelapan*, muncul daya beli tapi tanpa produktifitas sehingga minus daya bayar. *Kesembilan*, ada stabilitas tetapi tanpa akselerasi.

Tentu, ini soal inti. Karenanya ini perang kecerdasan. Perlu kejeniusan semesta untuk memahami dan memenangi perang ini. Dus, agar lebih tajam pengetahuan soal negara swasta sebagai arsitektur politik kolonial, kita perlu membaca banyak buku dan riset postkolonial studies.

Singkatnya, dalam negara swasta, program ekopol kerakyatan bersendikan koperasi dan penyehatan BUMN berakhir nihil karena: *Pertama*, koperasi dan BUMN tidak terdapat cantolannya secara bahasa, baik di Pancasila maupun di UUD45. *Kedua*, karena tak ada kata dari keduanya, muncul tafsir yang sangat beragam dan perdebatan yang tak berujung. *Ketiga*, kedua tema itu tak ada kurikulumnya di seluruh



sekolah-sekolah kita, baik formal, informal maupun non-formal.

*Keempat*, kita tak banyak agensi dan komunitas epistemik yang memperjuangkannya. *Kelima*, terlalu banyak kurikulum dan agensi yang memusuhi isu bertema keduanya. Karena kelima tesis ini, para ahli hukum, ekonom, ahli politik dan sejarah keduanya tak bersinergi di semua lini dalam meletakkan duduk persoalannya. Akhirnya fundamentalisme pasar, fasisme ekonometrika, feodalisme harga makin merajalela.

Setelah makin paham, kalian masih bimbang dan ragu untuk memulai revolusi? Setelah makin paham akan krisis, rasanya kita harus segera ke luar dari semedi. Ke luar dari kedunguan dan kebingungan. Bersegera berburu para penjahat yang culas dan serakah untuk ditikam tepat di jantungnya.

## ***Kedelapan***

### **KRISIS AKAL ALTERNATIF**

Jika terus semedi, kemelaratan terus menjadi. Melarat sendiri musuh terburuk dari kemanusiaan (Yuval Noah Hariri, 2018:3). Jika melarat, krisis akan terus menari: hip-hop. Terutama krisis finansial: hempasan akibat depresi nilai tukar (A. Prasetyantoko, 2009:12). Dus, kita harus keluar dari semedi sebab bukan tak ada solusi, tapi tak ada akal, tak ada kepedulian. Dan, sudah lama kita diamkan hal-hal penting dalam perjalanan bernegara. Akal kita tak peduli. Padahal, akal yang pensiun dini adalah hulu kebekuan jalan kehidupan.

Mengingat tesis itu mengingatkan kita pada ketikan Martin Luther King (1972:12) yang berfatwa, “*Our lives begin to end, the day we become silent about things that matter.*” Akhirnya, kita mengidap penyakit defisit kapasitas, minus integritas. Kondisi ini paling akut terjadi di elite

Indonesia. Kemampuan mereka menyelesaikan masalah tak teruji. Idealisme mereka fokus pada kejeniusan untuk *crank* dan menyempal sangat diragukan bahkan memalukan.

Tentu saja, mereka bukan bodoh. Tapi dibodohkan. Mereka bukan miskin. Tapi dimiskinkan. Mereka bukan terpinggirkan. Tapi dipinggirkan. Oleh siapa? Oleh tipu daya neokolonial dan lingkungan yang terus membusuk.

Akhirnya, mereka kehilangan 3 sekawan yang sangat fundamental dalam kehidupan berbangsa-bernegara: mentalitas, moralitas dan intelektualitas. Tak percaya? Lihat kasus Freeport dan asset-asset strategis lainnya.

Dari kisahnya, yang ada hanya mental kolonial. Moralnya begundal. Intelektualnya tukang. Karenanya, mereka bukan pemberi solusi sebab mereka menjadi problem. Karenanya, mereka tidak mampu mencipta sistem yang mampu meratakan kekayaan secara signifikan.

Lebih parah, kita tak risau dengan kondisi tersebut. Apalagi sistem demokrasi kita yang makin super anti keadilan, anti pemerataan kesejahteraan, anti kemakmuran bersama. Selebihnya, demokrasi kita makin memayungi krisis yang berkelanjutan.

Padahal, krisis adalah cara para kapitalis merekapitalisasi kapitalnya berlipat ganda melewati ambang batas kewarasan. Melompati akal sehat dan sangat anti kemanusiaan. Dalam cengkraman akal beku dan tak punya alternatif, negeri krisis ini membutuhkan lebih dari sekedar seorang presiden atau raja. Kita butuh seseorang yang bekerja untuk semua. Bukan untuk diri dan kelompoknya saja. Yaitu seseorang yang kita sebut pahlawan.

Ya. Sayangnya yang ada kini, elite yang bertarung baru sekedar sekelas presiden. Sekelas buruh pabrik. Sekelas pekerja yang belum melampaui sekat-sekat kelompoknya saja.

Yang ada terlalu sibuk dengan pidato, utang dan infrastruktur. Begitu sibuknya pada hal-hal pariferal sehingga abai terhadap keselamatan warga negara (*human security approach*).

Rupanya prioritas pembangunan mereka bukanlah keamanan kehidupan manusia, alam raya dan masa depannya.

Di sini kita butuh pahlawan sejati. Kita butuh agensi *crank* yang dahsyat. Kita butuh akal alternatif. Kita butuh kejeniusan yang berdentum keras agar tercipta alat baru demi terhapusnya kolonialisme di Indonesia dan semesta ini.

Ini sangat penting. Sebab, semua agensi, iptek dan agama yang pernah ada sudah tak berfungsi. Ketiganya hanya peternak begundal: teroris, feodalis dan fundamentalis yang serakah. Para pemuja ketiganya adalah mereka yang bahagia saat sesamanya sengsara dan sedih saat lainnya bahagia.

Agensi, agama dan iptek yang memproduksi manusia berwajah pribumi bermental-beragama kompeni. Bajingan-bajingan bangsa berselubung keserakahan syaitan yang terus merajalela. Semua yang nanti ditikam mati oleh pahlawan pembela bangsa, penjaga hati. Semua yang nanti harus dienyahkan karena kejahatannya tidak tak terampunkan.

## ***Kesembilan***

### **KRISIS KEADILAN SOSIAL**

Ketika akal krisis, keadilan menjauh. Padahal, konstitusi kita adalah konstitusi keadilan sosial (Jimly Asshiddiqie, 2018:76). Maka, apakah warganegara makin merasa mendapat keadilan? Riset kami di Nusantara Centre menjawab dengan tegas: tidak. Baik keadilan komunikatif, keadilan distributif, keadilan legal, keadilan vindikatif, keadilan kreatif, maupun keadilan protektif.

Keadilan komunikatif (*Iustitia communicativa*) adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang

terhadap apa yang menjadi bagiannya dengan berdasarkan haknya pada objek tertentu.

Keadilan distributif (*Iustitia distributiva*) adalah keadilan yang menilai dari proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan jasa, kebutuhan dan kecakapan. Biasanya dari negara ke warga negara.

Keadilan legal (*Iustitia legalis*) adalah keadilan menurut undang-undang di mana objeknya adalah masyarakat yang dilindungi UU untuk kebaikan bersama atau “*banum commune*.”

Keadilan vindikatif (*Iustitia vindicativa*) adalah keadilan yang memberikan hukuman atau denda sesuai dengan pelanggaran atau kejahatannya.

Keadilan kreatif (*Iustitia creativa*) adalah keadilan yang memberikan tiap orang berdasarkan bagiannya berupa kebebasan untuk menciptakan kreativitas yang dimilikinya pada berbagai bidang kehidupan.

Keadilan protektif (*Iustitia protektiva*) adalah keadilan dengan memberikan penjagaan atau perlindungan kepada pribadi-pribadi dari tindak sewenang-wenang oleh pihak lain. Dari enam keadilan tersebut, ketidakadilan terparah pada wilayah distributif, vindikatif dan protektif. Warga negara merasa negara abai, penegak hukum bermasalah dan pemerintah tidak melindungi segenap tumpah darah warganya.

Akibatnya, ketimpangan merajalela. Indikasinya adalah praktik deindustrialisasi terus dikerjakan dan agama impor terus direalisasikan serta saat yang sama pemerintah hidup dalam *over investment* (penumpukan utang luar negeri) karena tak punya tabungan. Padahal, tiga pola yang berulang ini akan mengakibatkan krisis besar terus terjadi berulang-ulang di Indonesia.

Ini adalah arsitektur ekopol mutakhir yang sedang kita alami. Praktis, pemerintah memilih jalan tanpa ujung sebab dengan krisis itu mereka dapat untung.

Beberapa data riset LPS 2017 mengkonfirmasi betapa krisis ini sangat dalam. Misalnya, data dari jumlah rekening yang ada di negeri ini adalah 246.293.377 rekening dengan jumlah uang sebesar 5.314T.

Dari data itu, jumlah orang yang punya uang di Bank di atas 5M= 1,9%. Jika dibulatkan jadi 2%. Tetapi 2% populasi tersebut ternyata menguasai 85% uang. Sisa populasi 98% lainnya hanya menguasai 15% uang.

Tentu data sebaran ini bukanlah satu-satunya perangkat yang tepat untuk melihat kekayaan warga negara karena data ini tidak berbicara aset non uang. Tetapi secara garis besar, data ini bisa jadi acuan, bahwa negeri ini memang punya masalah di titik sebaran kekayaan uang.

Kelompok elite yang punya di atas 5M, ada 2% populasi yang memiliki kemampuan memutar 4500T. Sedangkan 98%, populasi penduduk sisanya yang punya uang di bawah 5M berarti 241 juta rakyat ini hanya memutar 750T.

Ada perbedaan besar sebab 750T berbanding 4500T. Dan, yang paling ajaib, rekening atas namaku sebagai tukang ketik tak pernah menyentuh angka 5M.

Kini kita tak mampu membedakan lagi keadilan dan kemungkar; kebenaran dan kesalahan; kecerdasan dan kejahiliyahan; idealisme dan pelacuran. Semua absurd. Padahal, negara ini didirikan bukan untuk satu dua golongan. Negara ini dihadirkan untuk semua, agar makmur bersama, bahagia berjamaah dan berkeadilan semesta.

Keadilan memang menjadi barang langka. Ia makin tak berwujud di alam semesta. Ia makin mahal. Ia tak diternak bahkan oleh para penjaganya. Ia punah di zaman modern. Ia mati tanpa diracun.

Akankah sejarah kelam ini kita biarkan? Di manakah kalian berdiri? Biar zaman jadi saksi. Biar pewaris mengerti.

## *Kesepuluh*

### KRISIS PEMERATAAN

Saat keadilan punah, saat itu pula pemerataan rizki tak terjadi. Dan, itu mengkhianati konstitusi ekonomi (Jimly Asshiddiqie, 2010:89). Kapan itu terjadi? Kita bisa mulai dengan pertanyaan serius, “apa dosa terbesar pemerintahan Indonesia terhadap warganya sejak Orde Baru?” Adalah beragama “pertumbuhan.” Iman pada pembangunan berdimensi pertumbuhan inilah “dosa asal dan dosa induk” yang tak banyak dipahami presiden-presiden kita selanjutnya.

Ya. Kita harus mengerti. Beberapa presiden kita gagal saat berkuasa bukan karena kurangnya kemampuan, jaringan, pengetahuan ataupun keberanian, namun hanya karena mereka tidak pernah mengatur energinya fokus pada tujuan bernegara yang ada di konstitusi: yaitu pemerataan.

Padahal, ilusi pertumbuhan itu memabukkan. Ia jadi mantra sakti para agen kolonial saat merampok suatu negara. Ia jadi azimat kurap para begundal saat menipu suatu bangsa. Mereka berfatwa, “hanya dengan pertumbuhan” suatu bangsa bisa sejahtera!

Pertumbuhan ekonomi pada awalnya diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Dus, pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Tetapi, dalam perkembangannya, teori pertumbuhan ini menikah dengan matematika sehingga melahirkan anak haram ekonometrika. Satu kurikulum baru di mana semua hal ikhwal pembangunan diukur dengan sendi dan sandi angka-angka minus kemanusiaan.

Karenanya, *roadmap* pertumbuhan adalah penanaman modal asing dan penciptaan hutang luar negeri. Akibatnya terjadi serbuan investor asing-aseng yang tak peduli dengan nilai-nilai lokal. Tanpa disadari, kebijakan penarikan investor ini mengakibatkan undang-undang Indonesia (yang mengatur arus modal) menjadi paling liberal di dunia internasional. Saat yang sama juga menghasilkan intensifikasi pertanian dan deindustrialisasi nasional plus pengadaan murah aset strategis (BUMN).

Hilirnya adalah pemerintahan sentralistik yang buas, lahirnya kota-kota baru, urban, kemacetan, kebusukan, banjir dan keruwetan tiada tara. Yang dikejar adalah akumulasi angka, deret ukur, grafik-grafik yang ilusif dan cenderung manipulatif. Orientasinya kapital. Yang dipuja harta benda. Yang dipeluk gengsi dan citra.

Akibatnya, pemerintah absen di mana saja. Pemerintah lupa membangun tata kelola yang bersih, efektif, demokratis dan amanah yang memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan. Pemerintah lupa membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Lupa pemeratakan pembangunan. Mereka lebih sibuk melayani seponsor dan pendukung sambil mengkhianati konstitusi.

Dengan pertumbuhan itu, memang ada prestasi besar tiap rezim di Indonesia. Dan, prestasi terbesarnya adalah mewariskan ketimpangan. Inilah penyebab stabil dan bertahannya kemiskinan, kebodohan, kesakitan, konflik, kemandulan inovasi, kepunahan, kedunguan dan ketergantungan plus ketidakmandirian/ketidakdaulatan yang kita nikmati bersama (9K).

Ketimpangan itu bisa diukur dalam banyak metoda. Salah satunya rasio gini dan prosentase pendapatan. Riset kami menunjukkan bahwa 0.8% rumah tangga terkaya di Indonesia menguasai 60% dari total kekayaan negeri ini. Itu artinya kekayaan 9000T yg ada maka hampir 5000T ada di tangan 2 juta orang saja.

Dan, 10% konglomerat menguasai 80% total kekayaan republik. Itu artinya 100 konglomerat menguasai hampir 7000T di semua lini bisnis mereka. Para konglomerat itu mengakumulasi uangnya via bisnis legal (25%) dan illegal (75%). Legal artinya bisnis yang berhubungan dengan APBN dan bayar pajak. Sedangkan illegal artinya bisnis haram (narkoba, pelacuran, judi, penyelundupan dll) dan tak bayar pajak.

Kini, nilai konsumsi 10% konglomerat sama dengan 55% warga miskin. Dan, konglomerat asli Indonesia hanya 0.7%. Sisanya asing dan aseng. Begitu mengerikan data sementara ini. Tetapi ini akan terus berlangsung.

Dari data ini, kita mau apa? Sibuk lempar kursi, berziarah, kutip-kutip kitab suci, mimpi dana revolusi dan mengkader kriminal begundal muda sambil membiarkan begundal tua mencopet di gedung-gedung dewan atau bagaimana?

Yang jelas, ide pemerataan raib. Musnah ditelan keluguan dan blusukan. Mereka, sambil mengaku berpancasila dan berindonesia tetapi sejatinya menjadi begundal lokal dan *proxy* Mamarika dan *antek* Tjina.

Aduhhhhh. Ini dosa siapa dan dari mana kakek moyangnya! Apa yang mereka baca dan apa yang mereka konsumsi sebenarnya?

Karenanya, kita kini masih menunggu solusi cerdas dari kalian sambil mari terus bergandengan tangan melawan dan



mengubur pokok penyebab gagalnya kita menjadi pahlawan warganegara, perealisasi Pancasila.

### *Kesebelas*

## KRISIS UANG DAN TURUNANNYA

Merealisasikan ekonomi-politik Pancasila sungguh sulit. Terlebih saat banyak ekonom membohongi publik dengan mengatakan bahwa resesi dan depresi adalah sejarah alamiah dari siklus bisnis. Padahal itu muslihat Bank Sentral untuk mengeruk uang dari warganegara (Andrew Hitchcock, 2006:3).

Karena itu sungguh ini sejarah ekonomi-politik yang maha sulit dipahami. Perlu IQ besar dan usaha super sungguh-sungguh. Mungkin dari sepuluh juta manusia Indonesia, hanya satu orang yang mampu memahaminya. Kini, karena satu dua orang bertanya, wajib kusampaikan kebenarannya.

Di peta nasional, hanya Amien Rais, Megawati, Rizal Ramli, Revisond Bazwier, Prabowo yang sudah mulai memahami. Kelas Habibi, SBY, Jokowi, JK, ketua-ketua partai apalagi jenderal-jenderal, kyai-kyai, romo-romo, pastur-pastur, rektor-rektor dan anggota DPR/MPR (politisi) masih jauh sekali. Otak dan nalarnya tak cukup dan bahkan jadi agensi serta begundal lokal.

Alangkah senang sebenarnya jika kukisahkan sambil menatap bening matamu. Di pantai, sambil minum air kelapa muda. Tetapi, baiklah. Simak baik-baik. Ini jawaban dari pertanyaan kalian, “apa sesungguhnya yang sedang menimpa Indonesia?”

Kisah ini bermula dari sebuah tanya. Pertanyaan dari seseorang yang sangat serakah dan konglomerat kepada ekonom. “Bagaimana agar kapitalnya berlipat, bukan

bertambah.” Ekonom itu menjawab: DENGAN MENGUASAI PASAR FINANSIAL.

Operasinya ada enam: privatisasi, liberalisasi pasar modal, penentuan harga via pasar bebas dengan mengabsenkan negara, perdagangan bebas di seluruh dunia (Joseph Stiglitz, 2009:111), berternak presiden proxy serta memanfaatkan media sebagai penentu kebenaran.

Dan, cara tercerdas menguasai pasar finansial adalah dengan menciptakan teori asal muasal uang dan derivatifnya. Banjirlah mutannya (kertas, plastik dan elektronik). Tapi ingat, kisah tentang uang, kebanyakan adalah kisah tentang keserakahan, penipuan dan kecurangan.

Para ekonom itu kemudian mencipta mutan uang artifisial untuk menggantikan uang asli. Sebab yang asli terlalu sulit dikuasai. Hal itu adalah manifestasi penipuan dan kecurangan (*fraud*) kedua.

Uang artifisial menjadi bukan hanya alat tukar tetapi juga alat investasi dan alat kolonialisasi. Uang ini sangat berbeda dengan uang asli karena uang asli mempunyai nilai intrinsik, sedangkan uang artifisial tidak. Satu-satunya nilai dari uang artifisial adalah kekuatan pasar.

Tetapi, nilai pasarnya akan bertahan sepanjang ada kepercayaan publik dan permintaan terhadapnya di pasar. Permintaan itu sendiri berdasarkan kepercayaan. Sayangnya, kepercayaan adalah sesuatu yang mudah dimanipulasi: via media dan agensi. Dus, uang adalah persepsi, bahkan ilusi terbesar abad ini. Dari uang, kita banjir krisis finansial. Ujungnya bencana finansial (A. Prasetyantoko, 2009:33).

Dan, tipuan ketiga adalah mitos asal muasal rezim kertas. Rezim tanpa kekayaan stabil (emas). Rezim angka (moneteris) dan mitos hitungan (pasar). Kita tahu bahwa era tahun 1970-an, sistem Bretton Woods runtuh. Tidak diberlakukan lagi *gold exchange standard*. Lalu, dilahirkanlah rezim sistem

tukar menggantung yang dapat disesuaikan (*adjustable-peg exchange-rate regime*). Inilah tipuan keempat. Tipuan karena menempatkan kurs sebagai alat jajah yang beroperasi bagaikan sihir uang (Zaim Saidi, 2019:7).

Yang kelima adalah munculnya konsep baru yang disebut '*casino capitalism*.' Yaitu, negara memiliki peran sebagai agen spekulator yang akan mendominasi pasar luar negeri.

Dalam bentuk ini, secara finansial global, para aktor akan bertindak secara *voluntary* dan *casino capitalism* ini bersifat *unpredictable and avoidable*, di mana dampak yang dihasilkan akan mempengaruhi setiap individu dalam dunia perekonomian. Di sini lahirlah *currency war*, *debt trap*, bank independent, inflasi, deflasi, asuransi, leasing, rezim pertumbuhan dan berbagai hilirnya.

Lalu, apa hubungannya dengan kita? Begini alegorisnya. Kalau kita menikmati lagu, maka nikmatilah dengan seksama dan harus full (*kaffah*). Jangan lihat parsialitas dan multi fokus. Jangan hanya dengar syairnya, drum, piano atau gitarnya saja. Agar kita tahu siapa konduktor dan produsernya.

Dalam konteks itu, melihat presiden/siapapun tanpa tahu siapa tangan besar yang menjadi konduktornya adalah seperti menikmati pianonya saja. Kita tak akan tahu apa-apa. Ya. Mereka hanya penabuh alat orkestra. Yang membunyikan alat musik sesuai perintah konduktor dan produsernya. So, kita harus melompati cara kaca mata kuda agar bisa melihat semesta. Satu semesta yang kini dikonduktori oleh begundal kolonial via teori uang. *The beginning from the theory of money*. Yang kebetulan aktor utamanya yahudi, perbankan dan berkurikulum neoliberal.

Yes. Now, *money is theory of everything* (kisah dan rumus semesta) yang diartikan sebagai penjabaran tak

terbantahkan tentang apresiasi dan proyeksi fenomena alam raya dalam sebuah rumus yang paling sederhana: uanglah segala-galanya. Ada uang, abang disayang; tak ada uang, abang ditendang.

Dengan rumus ini akan dapat dijelaskan dengan mudah, apa saja yang terjadi di jagad raya: penjajahan dan perlawanannya. Bagaimana kita bisa memahami saat lahirnya alam kolonial, interupsi, revolusi dan kapan dunia ini kiamat.

## ***Keduabelas***

### **PENJAJAH KERTAS: *SEIGNIORAGE***

Pada mulanya adalah ketamakan. Selanjutnya kudeta dan penyesatan. Itulah yang terjadi di banyak negara postkolonial: hilangnya gagasan dan semangat *experience-based economics*; semangat untuk melaksanakan nilai-nilai kerakyatan, nasionalisme dan pembebasan yang direalisasikan melalui program-program ekonomi dan politik yang dilandaskan pada semangat anti penjajahan asing, dengan menyusun suatu piranti pemikiran bernama ekonomi nasional.

Ekonomi nasional disusun melalui program proteksi dan industrialisasi, lewat program Rentjana Urgensi Perekonomian (RUP) yang di dalamnya terdapat Program Benteng, di mana usaha-usaha lokal dan dalam negeri, dan usahawan dalam negeri akan dilindungi dan dikembangkan dengan sokongan pemerintah.

RUP dimaksudkan untuk mengawali industrialisasi dengan jalan mengkaitkan kegiatan-kegiatan industri besar dengan industri kecil. Terintegrasi, kuat, mandiri, daulat menuju modern.

Sektor industri besar akan berfungsi sebagai determinan pertumbuhan yang strategis, khususnya untuk menjalankan

program substitusi impor, dan dengan itu akan meletakkan landasan bagi perekonomian nasional yang sesungguhnya. Program tersebut dilanjutkan dengan prinsipal penguatan haluan ekonomi-politik yang diarahkan pada model ekonomi terpimpin, untuk mewujudkan suatu perekonomian nasional yang kuat dan mandiri, melalui jalan industrialisasi.

Program ini dijalankan di bawah program semesta delapan tahun berencana di bawah payung kebijakan ekonomi terpimpin dan program *landreform* (reforma agraria). Para pemikir ekonomi Indonesia dan para pendiri bangsa seperti Mohammad Hatta, Sjafruddin Prawiranegara, Semaoen, bahkan Soekarno, memikirkan program atas dasar antitesa ekonomi kolonial yang timpang dan eksploitatif, dan bukan atas dasar doktrin-doktrin teori ekonomi pasar liberal.

Perkembangan pemikiran ekonomi Indonesia di awal kemerdekaan sampai masa demokrasi terpimpin, bisa dikategorikan sebagai *experienced-based economics*, di mana teorisasi ekonomi dibuat atas dasar fenomena sosial-politik, dan bukan pada doktrin ekonomi.

Cita-cita membangun ekonomi nasional dilandaskan pada pengalaman dan pemahaman atas ekonomi kolonial, bukan semata-mata merujuk teori ekonomi yang sudah mapan dan menjajah.

Singkatnya, ekonomi berdikari; ekonomi nasional; ekonomi konstitusi; ekonomi pancasila.

Namun pendekatan ini dihancurkan bersamaan dengan kudeta Soeharto dengan Orde Baru dan Golkarnya yang membawa ide neoliberal berbasis kurikulum ekonomi eksploitasi.

Kerakusan itulah yang menjadi dasar dan digunakan kaum neoliberal dalam mencengkeram kuasa global serta Indonesia. Mereka lalu menciptakan aturan “*seigniorage and interest rate* (bunga).” Teori *seigniorage* adalah cara

perampokan kekayaan via selisih antara biaya pembuatan uang fiat dengan nilai yang diberikan kepada uang tersebut.

Tetapi, konsep seigniorage tidak bisa aktif-efektif sebagai alat rampok kecuali dikawinkam dengan teori lanjutan yaitu *interest rate* (bunga) dalam hutang-piutang. Karenanya, petaka ujung seigniorage adalah pemberlakuan dollar sebagai mata uang yang berlaku di seluruh dunia, sementara negara-negara lain tidak diperbolehkan untuk mencetak dollar. Akibatnya, Mamarika paling banyak menikmati keuntungan seigniorage.

Mamarika mencetak uang sesuai keinginannya dengan harga cetak yang sangat murah, untuk berbelanja di manapun mereka mau; mereka mengatur sirkulasinya demi kepentingannya; mereka mengakuisisi aset negara-negara berkembang dengan nilai jauh lebih rendah dari nilai aslinya.

Pada mulanya seigniorage hanyalah hasil ngobrol lima sekawan yang dikerjakan sambil guyon di kedai kopi Sein di Austria. Mereka bermimpi bukan hanya ingin kaya, tetapi berlipat-ganda kekayaannya. Tanpa harus bekerja. Nick, Seigniorage, Rostow, Gielbert dan Euken adalah lima sekawan itu. Seignioragelah yang mencetuskan teori tukar barang dengan mata uang kertas.

Lalu, ide itu dibawa Ropke dan Simon ke Universitas Chicago untuk dikembangkan, sekaligus menaunginya. Kini, kita mengenalnya dengan sebutan *Chicago School*. Pada akhirnya Chicago School menyempurnakan konsep ekonomi neoliberal, konsep sistem ekonomi yang dipercaya sebagai solusi menekan tingkat depresi suatu negara. Tetapi, kenapa teori itu menjadi hilir bagi terpuruknya suatu negara? Begini kisahnya.

Mari mulai dengan pertanyaan pula. Siapa manusia tercerdas abad ini? Bukan nabi. Bukan tekhnolog. Tapi pencipta kurs bebas dan utang piutang. Orang-orang inilah

yang mencipta sistem perdagangan valas sehingga mampu mengontrol perekonomian global: menjajah negara-negara (bodoh dan miskin).

Mereka yang merubah pusat-pusat peradaban. Dari peradaban batu, arsitek, teknologi bahkan perang bintang menjadi “secarik kertas yang diberi angka.” Begitu cerdasnya, sehingga kita hanya bilang kagum dan “iya.”

Pada awalnya disebut “sistem Bretton Woods.” Itu adalah persetujuan yang mengatur nilai tukar semua mata uang (negara) terhadap emas. Tetapi, sistem ini tak membuat dominasi negara Mamarika kokoh dikarenakan mereka tak banyak cadangan emasnya. Maka, tahun 1971, sistem ini diganti dengan sistem nilai tukar berbasis volume ekspor dan impor.

Pasar mata uang pun perlahan mulai berevolusi dan bergerak bebas dengan Mamarika sebagai pemegang kendali karena ekspor dan negeri jajahannya besar plus teknologinya tinggi (mereka ekspor senjata dan produk budaya).

Negara-negara lain mulanya sulit untuk menentukan nilai tukar, namun seiring dengan perkembangan teknologi akhirnya bisa menentukan nilai tukar mata uang satu dengan yang lain dengan mudah.

Hanya di sistem pasar bebas, mata ajar matematik mati. Hanya di sistem ini, nalar kemanusiaan mati. Hanya di sistem ini, neokolonial subur dan tak dipahami manusia dengan kecerdasan biasa. Sebab, sistem ini dirancang oleh orang tercerdas abad ini. Yang bukan nabi, bukan teknolog apalagi tukang ziarah dan berdoa.

Kalau kalian masih anggap dengan mencium batu hitam akan kalahkan Mamarika, kalian mimpi di siang hari. Apalagi kalau hanya membaca kitab kuno dan menciumnya mesra seakan-akan mencium perawan ranum: kalian sesungguhnya di neraka sebelum waktunya.

Maka, ingat kawan-kawanku semua. Ini soal kejeniusan. Seribu tahun lalu, orang-orang tercerdas adalah pembuat agama (para nabi). Seratus tahun lalu, orang-orang tercerdas adalah pembuat nuklir (para teknolog). Puluhan tahun lalu, orang-orang tercerdas adalah pembuat uang dan teori utang-piutang (para ekonometrik).

Utang uang bersama kurs adalah hilir dari senjata neokolonial. Utang adalah uang yang dipinjam. Seseorang atau negara yang meminjam disebut debitur. Yang memberikan utang disebut kreditur.

Sebagai debitur, utang negara pada 2014 rezim SBY sebesar Rp2.604 triliun. Rezim Jokowi, per Maret 2015 Rp2.797 triliun, naik Rp193 triliun. Utang itu berasal dari pinjaman luar negeri sebesar Rp696 triliun dan SBN (Surat Berharga Negara) sebesar Rp2.099 triliun. Yang dari pinjaman luar negeri berasal dari Jepang Rp219.6 triliun, Prancis Rp24.9 triliun, Jerman Rp20.4 triliun. Negara lain Rp77.92 triliun. Bank Dunia (WB) Rp182.8 triliun, Asia Development Bank (ADB) Rp110.4 triliun, IDB Rp7.8 triliun. Lainnya Rp2.6 triliun. Dengan jumlah utang sebesar itu, kini setiap kepala warga negara punya beban 13 juta jika dibagi rata ke semua.

Apa kecerdasan kreditur (para ekonometrik)? Yaitu posisi mereka tidur, kita bekerja. Mereka nagih, kita pontang-panting. Mereka mendikte, kita tak bisa tidur. Mereka bersantai, kita terjajah. Mereka golf, kita diperkosa. Kukira tak ada nabi dan teknolog yang lebih cerdas dari para ekonometrik. Sebab para nabi dan teknolog bekerja keras, para ekonometrik bertamasya sambil berzina. So, apa solusinya jika Anda presiden?

Mungkin, seperti tuan Suroto Ph katakan, “Sepertinya kita sekarang hanya perlu membiasakan diri dengan krisis ekonomi hari-hari, dengan merusakkan lingkungan tak



terhenti, konflik penuh kebiadaban tak terperi. Semua itu karena kita semua telah terima doktrin persaingan dengan tangan terbuka. Itu semua karena kita telah menerimanya sebagai bagian penting dari hidup Indonesia.” Ya, krisis uang yang tak dipahami sebagai perang ekonomi dengan menempatkan uang sebagai alat perang.

### ***Ketigabelas***

#### **BEYOND KRISIS EKONOMI**

Jika uang sudah menjadi alat perang, krisis pasti berulang. Krisis sendiri merupakan topik satu-satunya yang tak pernah usang dalam ilmu ekonomi (Charles P. Kindleberger, 1978:56). Tetapi, kapan krisis ekonomi-politik suatu negara dimulai? Saat kita sudah kehilangan mental, moral, pengetahuan dan jiwa kesetiakawanan sosial. Apa tengarainya? Saat terjadi perubahan ekonomi secara cepat dan mengarah pada turunnya nilai tukar mata uang karena utang menumpuk, KKN, munculnya program pengurangan pajak korporasi dan konglomerasi sehingga defisit APBN dan harga kebutuhan pokok makin tak terkendali.

“Kalian tahu pangkal krisis? Tanyaku suatu kali pada mahasiswaku.” Adalah, “iman pada pasar yang berlebihan.” Padahal, iman pada pasar yang berlebih (neoliberalisme) itu penyakit kanker. Ia makin lama makin resisten terhadap vaksin sehingga ketika bertamu, kita butuh dosis yang makin tinggi untuk mengusirnya. Tapi, saat bertamu kembali, dampak kerusakan ekonomi negaramu makin dahsyat. Ya. *Instability is a normal result of modern financial capitalism* (Hayman P. Minsky, 1986:77).

Itu semua karena menjadi epistema neoliberal. Mengapa? Karena, *neoliberalism is unstable because it is a financial and accumulating system with yesterday, today and tomorrows*

*(last, now and next) with greedy. They make instability like a normal result.* Inilah *anabolic steroid* dan doping-doping yang sangat berbahaya!

Tentu saja, krisis adalah istilah lama dalam teori siklus bisnis. Ia merujuk pada perubahan tajam menuju resesi ekonomi dan sering merubah arsitektur politik. Dus, ia bukan peristiwa biasa. Ia justru sering menjadi alat bagi siapa saja untuk menjatuhkan atau mempertahankan suatu rezim dalam negara.

Krisis akan makin akut saat kita tak memiliki alat kebijakan untuk mengatasinya. Terlebih, saat ruang untuk stimulus fiskal sangat terbatas di tengah utang publik yang jumbo. Dus, kemungkinan untuk menggelar kebijakan moneter luar biasa akan dibatasi oleh neraca yang sudah membengkak, serta ruang terbatas untuk memangkas suku bunga.

Tetapi, dari semua argumen itu, ternyata krisis memang “anak haram demokrasi liberal.” Ia lahir, tumbuh dan berkembangbiak dari rakhim itu dan, lalu menghidupinya. Resiprokal. Makanya, saya tak percaya demokrasi liberal ada manfaatnya buat republik dan warga miskin seperti kita. Saya juga tak beriman pada demokrasi liberal yang sedang berjalan di Indonesia.

Bagaimana menghadapinya? Dengan merdeka 100%. Proklamasi kembali. Dengan berdikari. Jalannya via undang-undang perekonomian nasional dan undang-undang protokol krisis yang berisi program: 1) Mengevaluasi skala dan dimensi permasalahan likuiditas; 2) Menetapkan permasalahan likuiditas; 3) Merealisasikan langkah-langkah penanganan masalah likuiditas; 4) Melaksanakan program nasionalisasi; 5) Menjalankan *transformasi shadow economic*, 6) Mengerjakan kemplang utang, 7) Gerakan proteksi industri;

8) Realisasi ide nuklirisasi; 9) Memastikan pajak super progresif, dan 10) Praktik hidup zuhud, *crank*, menyempal.

Jika belajar dari Amerika, kita perlu mengkaji sepak terjang Ted Roosevelt ketika menumpas patunglipat Carnegie-Jp Morgan-Rockefeller dan menikam krisis yang diciptakan para oligark di elite negara. Jika belajar dari India, kita perlu mengkaji Gandhi dalam menggalang persatuan dan mengusir begundal-begundal Inggris saat merampok warganya.

Jika belajar dari para pendiri republik, kita wajib menghidupkan pikiran dan gagasan besar Tan Malaka. Sebab baginya, “kemerdekaan Indonesia harus dicapai lewat revolusi, bukan diplomasi.” Revolusi yang bagaimana? Tan Malaka menjawab, “dengan kerja sama antara kaum proletar dan bukan proletar.”

Dua agensi tersebut tetap merupakan syarat mutlak yang harus dipertahankan. Bila kerja sama antar agensi ini sampai terputus, akan ada kondisi terciptanya perbudakan nasional, yaitu penjajahan bangsa sendiri oleh satu agensi yang berkuasa.

Maka, revolusi Indonesia bagi Tan Malaka, haruslah bermata dua: ke luar untuk menghapuskan imperialisme, fundamentalisme dan oligarkisme (segitiga setan). Ke dalam harus memabat habis feodalisme, fasisme dan tribalisme (segitiga setan).

Tanpa konsepsi tersebut, terciptalah Indonesia hari ini: krisis yang berulang dan mencipta republik swasta, pamong jongos, peternak babu dan elite maling.

Agar tajam dalam berevolusi, kita perlu rumus identifikasi pejabat pemerintah itu agen penjajah atau bukan. Alat identifikasi itu untuk mencandra tindakan eko-politiknya mengarah pada penciptaan krisis, inefisiensi, perampokan dan hasut pecah belah masyarakat atau sebaliknya.

Dari rumus itu, kita dapat menarik nama-nama daftar agen penjajah atau pahlawan pembela bangsa di sekitar kita.

Jika rumusan itu disepakati maka kita akan mudah menulis ulang ARSITEKTUR EKONOMI-POLITIK INDONESIA. Tentu agar ada alternatif dalam menyusun aturan main berekonomi-politik ala Indonesia. Tidak sekedar kopi paste yang sering tidak mendekati janji proklamasi dan konstitusi. Sebaliknya makin menjauh dan membuat ketimpangan bin kejahiliyahan via krisis yang diciptakan berulang-ulang.

### *Penutup*

#### MEMENANGKAN KEHIDUPAN

Seorang kawan bertanya, “bagaimana menyikapi kekalahan kaum idealis di peta ekonomi-politik Indonesia?” Sungguh buatku ini pertanyaan maha sulit. Sebab bagiku, lebih nikmat jatuh dan mati sebagai tumbal keadilan daripada berjaya karena kebohongan dan kebiadaban.

Tetapi, menjawab pertanyaan maha sulit tersebut, mari berefleksi sejenak. Jika kita berjuang tak ada hasilnya, janganlah bersedih. Lihatlah semesta. Tataplah sejarah lebih luas. Bacalah dunia lebih detail. Tak semua orang besar berhasil saat hidupnya. Isa, Tan Malaka, Chairil Anwar, Gandi, Van Gogh adalah sedikit contoh yang namanya panjang bergelombang tanpa kesuksesan saat mereka hidup di dunia.

Dalam hidup ringkas dan keras ini, tidak peduli dari mana kita berasal serta apa agamanya. Yang terpenting adalah ke mana kita akan pergi dan apa yang akan kita wariskan. Kita harus bermetamorfosa, hijrah dalam substansi bahwa perjalanan ini terasa sangat menyenangkan, menantang, menggairahkan.

Dalam kesadaran hijrah, terkadang mereka (kawan-kawan kita) tak duduk di samping bangku kita lagi. Ya. Lalu. Sendiri. Sepi. Sunyi. Gelap dan berduri.

Tentu. Ada banyak kisah yang mestinya mereka saksikan. Ada tangis air mata yang dapat mereka usapkan. Terutama di tanah kering bebatuan. Di zaman kejahiliyahan. Saat sering tubuh ini terguncang. Oleng dan ambruk. Dihempas batu jalanan. Ditikam musuh. Diinjak kawan beda tujuan. Karena beda pendapat dan pendapatan.

Sering. Ya sering hatiku tergetar menatap kering rerumputan. Tak ada makna. Alpa makanan dan absen minuman. Sia-sia. Kami berpisah sambil saling tikam. Perjalanan hidup ini pun akhirnya jadi saksi. Para gembala kecil menangis sedih sekali. Sesedih-sedihnya. Tak paham lagi tujuan dewa jagatraya bekerja.

Kini, kalian yang pernah bersamaku, memetik gitar di gunung-gunung; demonstrasi di jalan-jalan; ribut di gedung-gedung pemerintah. Ayok coba dengar apa jawabnya. Jawaban para penguasa. Ketika kita tanya mengapa kalian KKN terus-menerus tak putus-putus. Yah. Korupsi terus saat bapak ibunya telah lama mati. Mati kelaparan dan ditindas. Ditelan bencana tanah ini. Bencana amoral dan tuna kuasa.

Kawan. Kini mari teruskan perlawanan. Kisah yang sesampainya di laut kita kabarkan kepada semuanya. Kepada karang. Kepada bumi. Kepada ombak. Kepada kekasih. Kepada matahari. Kepada para nabi. Walaupun kita tahu, semua diam, semua bisu, semua buta. Tinggal kita sendiri. Ya. Sendirian dalam perlawanan tak bertepi. Terpaku menatap langit. Ngungun. Terguguk sepi kehabisan air mata.

Walau begitu jangan berhenti. Barangkali di sana ada jawabnya. Ada solusinya. Dari sebuah tanya: mengapa di tanah Indonesia terjadi banyak bencana; berjuta perselingkuhan penguasa-pengusaha (oligarki); bermilyar

kebodohan; bertrilyun pengkhianatan. Bahkan di rumah-rumah Tuhan.

Adakah karena Tuhan mulai bosan. Sehingga kirim ujian. Timpakan cobaan. Sebal melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau nalar tumpul. Atau alam mulai lelah. Bersahabat dengan kita semua. Bercengkerama seperti sedia kala. Mari kini kita bertanya pada hati, jantung, otak, nalar dan rumput yang bergoyang ditelan ketidakpercayaan.

Mari kini lahirkan kesadaran agung. Dari pengetahuan substansi. Bahwa warisan terburuk penjajahan adalah mental, moral dan nalar kolonial. Inti mereka ada lima yaitu fasis, feodalis, fundamentalis, liberalis dan birokratis. Dengan lima warisan itu, Indonesia menjadi: 1)Pemasok bahan baku, 2)Pemasok babu, 3)Pengimpor barang jadi, 4)Pengimpor ahli, 5)Produsen broker.

Memahami hal itu, para pendiri republik berusaha merubahnya dengan sekuat tenaga. Yaitu dengan menggelorakan revolusi nalar. Apakah itu? Yaitu gerakan berbasis gagasan dari mental konstitusional. Bernalar membuat kita mampu menempatkan dunia sebagai metoda dan bahan sehingga memberikan perlakuan terhadapnya secara efektif sesuai dengan tujuan, rencana dan keinginannya. Dengan gerakan ini maka lahirlah nalar indonesia: memberontak, hibrida, interdependen, multikultural dan adaptif. Jika diperas, nalar indonesia itu adalah nalar pancasila.

Revolusi nalar dengan demikian adalah jihad merealisasikan Pancasila di manapun dan kapanpun serta oleh siapa saja dan dengan segala daya upaya. Inilah gerakan besar sehingga melahirkan mental, moral, rasa dan tindakan dahsyat demi tergapainya mimpi bernegara.

Di atas segalanya, kita harus sadar. Sejarah kita adalah sejarah kekayaan, perampokan, perlawanan dan kemiskinan. Dus, menjadi pahlawan dengan demikian adalah keniscayaan. Sedang menjadi pengkhianat adalah kebodohan. Mari berbaris menjadi pasukan Pancasila yang berkreasi sebagai ide penuntun (Rocky Gerung, 2018:40). Kita pastikan takdir kemartabatifan dan keberlimpahan sebagai ganti kemiskinan dan keterjajahan. Kini. Sekarang. Atau tidak sama sekali.(\*)



***Protokol Krisis Indonesia*** adalah hasil riset terbaru soal bagaimana menghadapi krisis multidimensional yang kita hadapi. Ia menjadi alat pandu sekaligus bintang penerang, bintang penuntun bagi para pemimpin bangsa-negara ini, kini dan ke depan.

---

***M. Yudhie Haryono***, teoritikus trias-ekonomika dan psiko-hermeneutika. Dua alat sempurna buat melawan kejahnya kolonialisme purba maupun penjajah modern. Menulis banyak hasil riset dalam bentuk buku yang didedikasikan buat peradaban masa depan lebih bijak, adil, martabatif, sejahtera dan mandiri. Jika tertarik, beberapa bisa didapat via e-book. Kini sedang bergiat menyempurnakan *kurikulum studi nusantara* dan mendirikan ***Universitas Nusantara*** di Bogor.